



Wali Kota Ancam Beking Jukir Liar

■ Pemkot Yogyakarta-Pemda DIY Dukung
Pemberantasan Juru Parkir Ilegal



TRIBUNJOGJA/PRADITO RIDA PERTANA

RAZIA - Kasubag Humas Polresta Yogyakarta, AKP Partuti bersama enam jukir liar di Mapolresta. Tampak pula karcis parkir tidak resmi yang disita petugas, Kamis (28/12).



Memang masyarakat pengin parkir dekat dengan tujuan, ada penyedia jasa parkir, ada hukum ekonomi, tapi jangan nutuk

Haryadi Suyuti
Wali Kota Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, menyatakan bakal menindak tegas siapapun oknum pegawai Pemkot Yogyakarta atau siapa pun di belakang atau beking para pengelola parkir liar yang telah melanggar peraturan di wilayah hukum Kota Yogyakarta. Saat dihubungi *Tribun Jogja*, Haryadi menyebut, apalagi melanggar, oknum yang kedapatan melakukan pembiaran terhadap

● ke halaman 11

Wali Kota

• Sambungan Hal 1

praktik parkir liar yang melanggar hukum juga bakal dikenai tindakan sesuai hukum yang berlaku.

Haryadi mengimbau masyarakat berani melaporkan pengelola parkir di wilayah Kota Yogyakarta yang menerapkan tarif tidak wajar, khususnya selama liburan Natal dan Tahun Baru.

"Memang masyarakat pengin parkir dekat dengan tujuan, ada penyedia jasa parkir, ada hukum ekonomi, tapi jangan nutuk. Masyarakat sebaliknya juga kita imbau jangan merusak rambu-rambu di larang parkir yang sudah ada. Jadi semuanya saling peduli, supaya hal seperti ini tidak terjadi. Kejadian di Alun-alun Utara ini jadi pelajaran bersama," kata Haryadi, Kamis (28/12).

Haryadi melanjutkan, adanya penindakan yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta, pihaknya sangat mendukung hal tersebut. Sebab, meski hanya masuk kategori tindak pidana ringan, tapi menurut Haryadi tetap saja hakikatnya adalah tindak pidana.

Ke depan, pihaknya berusaha memasukkan klausul soal *surcharge* atau biaya tambahan tarif parkir ketika musim liburan tiba. Hal ini untuk mengantisipasi tarif parkir yang tidak wajar seperti yang terjadi belakangan ini ketika musim liburan tiba.

"Nanti di Perda yang baru dibahas akan ada batas tarif atas parkir," tutur Haryadi.

Kewenangan Pemkot

Terkait polemik parkir liar di kawasan Alun-alun Utara, Yogyakarta yang mematok tarif jauh di atas ketentuan, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewen-

angan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta.

Ia menilai, meskipun Alun-alun Utara berada di wilayah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kawasan tersebut tetap menjadi bagian dari Pemkot Yogyakarta. Karena itu, pemerintah daerah setempat harus bisa tegas mengambil langkah, sebagai upaya penertiban.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sempat menyatakan kalau pihaknya tidak berani memberikan sanksi, melainkan hanya sebatas memberi imbauan semata. Sebab, mereka menilai kalau kawasan Alun-alun Utara merupakan bagian dari Keraton.

"Tu kan jalan umum, jadi tidak ada alasan, itu bukan urusan Keraton, itu urusan Pemkot (Yogyakarta). Keraton kan tidak punya kantor urusan parkir, tidak ada itu," kata Sri Sultan, saat dijumpai di Kompleks Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Yogyakarta, Kamis (28/12).

Ngarsa Dalem pun mendukung langkah aparat kepolisian, yang mengambil tindakan tegas, dengan mengamankan sejumlah juru parkir (jukir) liar, yang terbukti menaikkan tarif, jauh di atas ketentuan berlaku. Menurutnya, upaya itu bisa menimbulkan efek jera bagi mereka.

"Kalau ditangkap, ya harapan saya bisa memberi efek jera. Itu kan sudah masuk ranah pidana, tarif yang harusnya Rp2 ribu, jadi Rp40 ribu. Kalau Tipiring (tindak pidana ringan), itu sudah jadi wewenang kepolisian, bukan wewenang saya tentu saja," tandasnya.

Sri Sultan mengaku, sudah menjalin koordinasi dengan Wali Kota Yogyakarta, untuk menyelesaikan masalah yang sudah berulang kali terjadi ini. Kalau pun

polemik ini disebabkan kurangnya kantong parkir resmi, seharusnya para jukir bisa lebih bijak dalam menerapkan tarif.

"Dia pun liar kita tidak masalah kok, asal (tarif) tidak dinaikkan jadi Rp40 ribu. Kalau masalah (kantong parkir) itu urusan kota (Pemkot Yogyakarta), bukan urusan saya," tuturnya.

Rambu larangan

Kepala Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, Kombes Pol Tommy Wibisono menyikapi surat terbuka yang dilayangkan Forum Komunitas Kawasan Alun-alun Utara (FKKU) kepada instansi kepolisian terkait masalah perparkiran.

"Sebenarnya tanpa ada dan tidak adanya surat terbuka tersebut, kami dari pihak sudah menindak tegas masalah parkir yang ada di kota Yogya," ujar Kombes Pol Tommy Wibisono melalui sambungan telepon, Kamis (28/12).

Menurutnya, jajaran Kepolisian bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Selama ini diakui Tommy, pihaknya tidak pernah takut dan sudah menindak tegas baik dari oknum juru parkir nakal maupun kendaraan yang melanggar rambu lalu lintas di marka yang tidak sesuai peruntukannya untuk parkir.

Kendati demikian, pihaknya meminta kepada Pemkot, dalam hal ini Wali Kota Yogyakarta dapat berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memasang dan memperjelas rambu lalu lintas.

"Kami minta kepada Wali Kota, untuk memperjelas rambu lalu lintas. Jika tidak boleh parkir ya dipasang patoknya dengan jelas. Karena ini yang menjadi dasar kita menindak," terang Kombes Pol Tommy Wibisono.

Selama ini, patok rambu lalu lintas larangan parkir yang ada, dikatakan Tom-

my, kondisinya sudah banyak yang usang dan tak terawat, sehingga bisa menyulitkan petugas kepolisian di lapangan dalam menjalankan tugas.

"Jika rambu larangan parkirnya terpasang jelas, kan kami bisa bekerja sesuai apa yang terpasang dirambu," ungkapnya.

Siapkan formulasi

Sementara itu, terkait polemik parkir yang ada di DIY, Kapolres Bantul, AKBP Imam Kabut Sariadi mengatakan pihaknya jauh-jauh hari sudah menyiapkan formulasi khusus untuk persoalan parkir.

Ia mengaku jauh hari sebelum masa liburan datang, pihaknya sudah mengumpulkan semua *stakeholder* terkait.

"Dari mulai tukang parkir, pengelola wisata maupun pedagang di tempat wisata, sudah kami kumpulkan dan kami imbau tegas untuk tidak melakukan tindakan yang membuat citra Bantul maupun Yogyakarta tercemar," ujar Kapolres Bantul, AKBP Imam Kabut Sariadi.

Sejauh ini, pihaknya mengaku belum mendapat temuan maupun laporan dari Wisatawan yang mengeluh dan merasa dirugikan parkir saat berkunjung di wilayah Bantul. "Sejauh ini belum ada temuan masalah di lapangan, pun seandainya nanti ada, akan kami tidak tegas," ungkap dia.

Ia mengaku akan terus memantau semua perkembangan peristiwa yang terjadi. Pihaknya meminta para wisatawan yang berlibur dan berkunjung ke Bantul untuk tidak segan melapor jika menemukan kecurangan maupun kerugian yang dilakukan oleh para juru parkir.

"Jika merasa dirugikan, lapor kepada kami. Kami akan tegas lakukan penindakan," pesannya. (yud/aka/rtd/rff)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005